

Siaran Pers

RENCANA KERJA PEMERINTAH 2018: MEMACU INVESTASI DAN INFRASTRUKTUR UNTUK PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN

Jakarta (16/8) – Dalam Konferensi Pers Penjelasan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2018 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memaparkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP 2018) dalam rangka penjelasan lebih lanjut Nota Keuangan dan RAPBN 2018 yang disampaikan Presiden RI Joko Widodo kepada DPR RI di Sidang Paripurna DPR, Rabu sore. Turut hadir dalam konferensi pers tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, serta Menteri Kesehatan Nila Moeloek.

Mengawali paparan beliau dalam konferensi pers tersebut, Menteri Bambang menjelaskan capaian pemerataan pembangunan Indonesia yang semakin baik. Ketimpangan menurun, ditandai oleh koefisien gini yang semakin membaik. Koefisien gini untuk Maret 2017 tercatat 0,393 atau turun dari angka 0,408 pada 2015. Tingkat kemiskinan juga menurun menjadi 10,64 persen dan jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 27,77 juta jiwa. Maret 2017, persentase penduduk miskin berkurang dengan penurunan sebesar 2,03 persen *year on year* dalam setahun serta jumlah penduduk miskin juga berkurang 0,24 juta jiwa dalam setahun. Pada 2017, tingkat pengangguran menurun, menjadi 5,33 persen dari angka 5,70 pada 2014. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga membaik menjadi 70,18 pada 2016, meningkat dari angka 69,55 pada 2015. “Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencapai pemerataan pembangunan di Indonesia di antaranya menjaga ekonomi tetap tumbuh, meningkatkan investasi dengan kontribusi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang semakin meningkat, menjaga kestabilan inflasi dan nilai tukar rupiah pada kisaran 13.300 hingga 13.400 rupiah per dolar Amerika Serikat, membangun infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah, meningkatkan ketersediaan energi dan pembangunan pita lebar untuk menjangkau daerah terpencil,” papar Menteri Bambang.

Pemerintah telah menetapkan **RKP 2018** dengan tema “**Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan**”. RKP 2018 disusun dengan prinsip *money follows program* melalui pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial dengan memperhatikan pada penajaman program prioritas nasional, pengendalian pelaksanaan program hingga ke level proyek (satuan tiga), serta penajaman integrasi sumber pendanaan. RKP 2018 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMN 2015–2019 sehingga perkuatannya menjadi penentu pencapaian tahun terakhir di 2019. Alokasi seluruh anggaran adalah 481,9 triliun rupiah dengan rincian 269,1 triliun rupiah untuk prioritas nasional yang diamanatkan dalam RKP 2018 dan 212,8 triliun rupiah untuk prioritas RPJMN 2015–2019.

Sasaran prioritas RKP 2018 terbagi atas 10 prioritas nasional dan satu prioritas khusus yaitu Asian Games 2018 dan Asian Para Games 2018 serta 30 program prioritas. Sepuluh prioritas nasional tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) **Pendidikan**, dengan fokus pada peningkatan kualitas pendidikan vokasi dan peningkatan kualitas guru
- 2) **Kesehatan**, dengan fokus pada peningkatan kesehatan ibu dan anak, pencegahan dan pengendalian penyakit, dan penguatan upaya promotif dan preventif “Gerakan Masyarakat Hidup Sehat”
- 3) **Perumahan dan permukiman**, dengan fokus pada peningkatan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian layak, aman, dan terjangkau, serta peningkatan kualitas dan penyediaan infrastruktur dasar permukiman, juga peningkatan akses air minum dan sanitasi yang layak
- 4) **Pengembangan dunia usaha dan pariwisata**, dengan fokus pada peningkatan kontribusi sektor pariwisata, percepatan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI) prioritas

- 5) **Ketahanan energi**, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan energi, bauran energi (energi baru dan terbarukan)
- 6) **Ketahanan pangan**, dengan fokus pada produksi pangan (terutama dalam negeri) serta waduk dan jaringan irigasi
- 7) **Penanggulangan kemiskinan**, dengan fokus pada peningkatan pelaksanaan jaminan dan bantuan sosial tepat sasaran pemenuhan kebutuhan dasar
- 8) **Infrastruktur, konektivitas dan kemaritiman**, dengan fokus pada konektivitas dan integrasi mode untuk pengembangan wilayah, serta pengembangan transportasi perkotaan
- 9) **Pengembangan wilayah**, dengan fokus pada percepatan pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan, pembangunan perdesaan dan reforma agraria
- 10) **Politik, hukum, pertahanan dan keamanan**, dengan fokus pada peningkatan penguatan pertahanan, peningkatan stabilitas politik dan keamanan, dan kepastian hukum bagi masyarakat

Sesuai amanat **Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional**, RKP 2018 disusun melalui proses yang lebih sinkron dan terkoordinasi antara aspek perencanaan dan penganggaran melalui empat cara. *Pertama*, perkuatan kendali program yang menekankan prioritas dijabarkan sampai level proyek untuk memudahkan pengendalian rencana dan pelaksanaan pembangunan. *Kedua*, integrasi sumber pendanaan yang meliputi integrasi rencana pemanfaatan sumber pendanaan baik belanja pusat, transfer ke daerah maupun non APBN untuk meningkatkan efektivitas pendanaan prioritas. *Ketiga*, perkuatan koordinasi antar instansi pusat dan antara pusat dan daerah untuk menyusun prioritas yang disiapkan lebih awal dengan melakukan sinergi antar program dan antar pelaku pembangunan. *Keempat*, integrasi sistem dan dokumen yang mencakup integrasi sistem perencanaan, anggaran dan penilaian kinerja secara elektronik untuk pengendalian perencanaan. Dalam rangka sinkronisasi tersebut dan untuk mendukung prinsip *money follows program*, maka sesuai kesepakatan antara Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, dan Menteri PAN RB, telah diluncurkan **Sistem Aplikasi Integrasi Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja**. “Dengan adanya sistem ini, diharapkan kementerian/lembaga dapat lebih efektif dan efisien dalam melakukan perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja dan pengendalian proyek pembangunan sehingga target-target pembangunan dapat tercapai secara optimal,” tutup Menteri Bambang.

Jakarta, 16 Agustus 2017

Thohir Afandi
Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan
Kementerian PPN/Bappenas

Untuk informasi lebih lanjut:
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310
Telepon: (021) 31936207, 3905650
Faksimile: (021) 31901154
Email: humas@bappenas.go.id